

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Salah satu persoalan mendasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan. Selain untuk memelihara keabsahannya (legitimasi), pemerintah juga akan membawa kemajuan masyarakatnya baik di kota maupun di desa sesuai dengan perkembangan jaman. Menurut Wahjudin Sumpeno, (2011:17), Pergeseran paradigma pembangunan dari pusat ke desa secara langsung mendorong upaya perbaikan sistem pemerintahan dan perencanaan yang lebih terintegrasi. Dimana perencanaan yang disusun dalam berbagai tingkatan pembangunan memiliki karakteristik kemajemukan, demokratis, jangka panjang, transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan mampu menjawab persoalan yang dihadapi langsung oleh masyarakat di lapisan bawah

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam penyelenggaraan pembangunan tahapan yang paling awal adalah tahap perencanaan. Wahjudin Sumpeno (2011 : 31) perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan mencakup keputusan dan pilihan berbagai alternatif sumber daya untuk mencapai tujuan

tertentu pada masa yang akan datang. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat di dalam melaksanakan proses pembangunan (partisipatif). Dengan kata lain keterlibatan/partisipatif masyarakat merupakan kata kunci agar suatu pembangunan bisa sukses. Tanpa melibatkan peran serta masyarakat di dalam proses pembangunan, pemerintah hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya serta tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dengan demikian partisipasi masyarakat merupakan hal yang urgent atau penting dalam perencanaan pembangunan.

Secara umum partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Jadi Partisipasi masyarakat adalah proses pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi, melalui kemitraan setara, transparansi, kesetaraan kewenangan, kesetaraan tanggung jawab dan kerja sama. Partisipasi merupakan bagian penting dari budaya bangsa kita yang senantiasa menempuh pendekatan musyawarah untuk mufakat dalam mencari jalan keluar serta pengambilan keputusan bersama. Dengan kata lain apapun yang menjadi hasil ataupun keputusan musyawarah mufakat tersebut sudah menjadi tanggung jawab bagi semua peserta musyawarah dalam konteks ini adalah masyarakat.

Sehubungan dengan pengertian partisipasi di atas Rahardjo (2006:41), menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemen keuangan

tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh peran serta dan respons masyarakat terhadap pembangunan atau dapat disebut sebagai partisipasi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya membangkitkan partisipasi masyarakat tersebut. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat akan berpartisipasi secara langsung terhadap pembangunan. Proses pembangunan akan lebih berjalan dengan lancar maka perlu adanya segenap masyarakat yang ikut ambil bagian dan diharapkan menunjukkan dampak yang signifikan dalam proses pembangunan, terutama untuk pembangunan jangka panjang. Pendekatan partisipatif sangat penting diterapkan dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang merujuk pada hasil yang benar-benar sesuai dengan apa yang diniatkan oleh masyarakat. Dengan demikian rasa memiliki akan hasil proses pembangunan dapat dimiliki oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kebutuhan dasar seperti halnya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi. FAO (1991) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah hak azasi, sehingga masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Tujuan utama dari partisipasi adalah untuk mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penetapan kebijakan (keputusan) secara proporsional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan di dalamnya. Kerlibatan masyarakat luas (publik) dalam proses penentuan kebijakan merupakan satu cara efektif untuk menampung

dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam. Pengikutsertaan publik yang terwujud dalam perencanaan yang partisipatif dapat membawa keuntungan yang substansif, dimana keputusan publik yang diambil akan memberi rasa kepuasan dan dukungan publik yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik yang dapat memberikan nilai strategis bagi masyarakat itu sendiri menjadi salah satu syarat penting dalam upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Rahardjo Adisasmita, (2006: 38) mengatakan bahwa pola perencanaan pembangunan yang mendorong terjadinya partisipasi aktif masyarakat tersebut lebih dikenal dengan istilah perencanaan pembangunan partisipatif atau biasa dikenal dengan istilah perencanaan partisipatif. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan atau pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan masyarakat lokal). Perencanaan partisipatif berangkat dari keyakinan bahwa keberhasilan program-program pembangunan ditentukan oleh komitmen semua *stakeholders*, dan komitmen ini di dapat dari sejauh mana mereka terlibat dalam proses perencanaan program tersebut. Perencanaan partisipasi ini berlaku untuk perubahan pembangunan di kota maupun di desa.

Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa. Dengan demikian, untuk memajukan Negara yang besar ini, harus berawal dari pembangunan desa. Desa sebenarnya memiliki fungsi posisi yang strategis dalam

pelaksanaan pembangunan dan politik pemerintahan diseluruh tanah air. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, perlu sebuah perencanaan pembangunan yang matang dengan melibatkan segenap komponen masyarakat desa, yang disebut dengan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Musrenbangdes memberikan kesempatan luas bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan membahas permasalahan yang dihadapi dan alternatif pemecahannya di tingkat desa untuk dibawa di tingkat Murenbang kecamatan dan selanjutnya dibawa ke Musrenbang Kabupaten maupun Provinsi. Tetapi dalam realitanya pelaksanaan konsep ini tidak selamanya berjalan sesuai dengan arahan, semangat dan tujuan awal diselenggarakan Musrenbangdes ini.

Mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang dilaksanakan mulai musrenbangdes sampai kecamatan belum melibatkan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan. Ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan dalam musrenbang kecamatan merupakan rumusan elit desa, sehingga partisipasi masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan. Rendahnya sosialisasi dari pemerintah tentang musrenbang terutama di tingkat desa serta sikap apatis masyarakat yang tinggi karena usulan yang diberikan masyarakat kurang diperhatikan atau didengarkan, menyebabkan masyarakat merasa tidak perlu ikut serta dalam proses Musrenbang.

Secara umum, masyarakat desa Watowara telah melakukan Musrenbangdes sebagai forum yang melibatkan beberapa komponen

masyarakat mulai dari kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, serta tokoh masyarakat untuk merencanakan pembangunan desa.

Namun, tahapan awal pelaksanaan Musrenbangdes, yaitu sosialisasi kepada masyarakat dan penjangkaran aspirasi masyarakat di tingkat Dusun, RW dan RT belum sepenuhnya dilakukan. Disamping itu forum musyawarah hanya didominasi oleh sebagian orang yang mampu menyampaikan aspirasi masyarakat, selebihnya peserta hanya datang dan mendengarkan saja jalannya perencanaan sehingga partisipasi yang terjadi belum sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil pengamatan awal penulis pada Desa Watowara diketahui bahwa, jumlah masyarakat Desa Watowara yang berpartisipasi dalam Musrenbangdes tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar hadir Musrenbangdes Desa Watowara

No	Tahun	Hadir		Tidak Hadir	Jumlah Seharusnya Hadir
		L	P		
1	2013	21	15	39	75
2	2014	35	9	31	75

Sumber data sekunder: Sekertaris Desa Watowara, 2014.

Dari hasil pengamatan dan data di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi kehadiran masyarakat Desa Watowara dalam menghadiri Musrenbangdes Desa Watowara tahun 2013 dan 2014 sebagai berikut, pada tahun 2013 jumlah undangan yang seharusnya hadir dalam Musrenbangdes

berjumlah 75 orang tetapi pada hari dilaksanakan Musrenbangdes jumlah partisan yang hadir berjumlah 36 orang yang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Kondisi partisipasi perencanaan pembangunan lewat Musrenbang tahun 2013 dapat dibandingkan dengan partisipasi kehadiran pada Musrenbangdes pada tahun 2014 yaitu jumlah undangan yang dibagikan berjumlah sama yaitu 75 undangan, namun hanya 44 orang warga atau peserta yang hadir yakni terdiri dari 35 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah partisan meningkat akan tetapi partisan- partisan yang mengikuti Musrenbangdes tersebut banyak di hadiri oleh aparat desa Watowara, Berdasarkan wawancara dengan salah seorang warga, bapak *Philipus, sabtu, 11 April 2015*, mengatakan bahwa

“dari Musrenbangdes yang sudah pernah diadakan tingkat partisipasi masyarakat yang dilihat dari tingkat kehadiran masih jauh dari harapan, serta keaktifan peserta dalam memberikan usul dan saran relatif rendah. Kegiatan Musrenbangdes yang seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat di desa Watowara nyatanya hanya merupakan kegiatan formalitas yang dihadiri oleh perangkat desa dan sebagian tokoh kecil yang sama sekali tidak mewakili keseluruhan masyarakat desa Watowara. Sehingga pada akhirnya penyusunan dokumen perencanaan dilakukan tanpa berdasar pada usulan dari masyarakat melainkan hanya berupa asumsi dan perkiraan dari aparat desa. Selanjutnya ia berpendapat bahwa permasalahan yang lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan, sehingga muncul sikap apatis dari masyarakat mengenai perencanaan pembangunan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan belum diketahui dan dimengerti oleh sebagian besar masyarakat. Sehingga pada waktu proses perencanaan tidak ada kemauan yang muncul dari masyarakat untuk ikut terlibat di dalamnya. Hal ini disebabkan karena belum ada pemberitahuan secara rinci dari pihak pemerintah desa mengenai bagaimana proses perencanaan pembangunan, apa dan bagaimana Musrenbangdes, untuk kepentingan apa dan sebagainya”.

Sehubungan dengan pernyataan di atas dan berdasarkan hasil observasi penulis diduga bahwa masalah yang dialami desa Watowara yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbangdes dan memberikan usul dan saran pada rapat tersebut, maka dari itu berdasarkan uraian latar belakang masalah maka, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: ***ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2014 DI DESA WATOWARA KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR.***

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa tahun 2014 di Desa Watowara Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menggambarkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Watowara.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai masukan bagi Pemerintah Desa Watowara tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan desa.
2. Sebagai masukan bagi seluruh masyarakat Desa Watowara agar dapat meningkatkan kesadaran berpartisipasi dalam perencanaan program pembangunan desa.
3. Sebagai informasi bagi peneliti lanjutan.